



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASMARHANSYAH**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **814980**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 968.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/63 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 554 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 111.100.000**

1. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ----****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 170.552.245****F. HARTA LAINNYA****Rp. 23.000.000****Sub Total****Rp. 1.272.652.245****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.272.652.245**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI WIBOWO**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **922108**

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 527.045.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/145 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 282.045.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 214.000.000 |
| 1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000 | | |
| 2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 18.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | 285.000.000 |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 287.522.290 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 1.331.567.290 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 1.331.567.290 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : MUHAMMAD NUR IMANSYAH
- Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
- NHK : 657588

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|--------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 375.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/85 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 8.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 3.200.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 1.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 387.200.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 570.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | -182.800.000 |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULISTYAWATI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **141944**

II. DATA HARTA

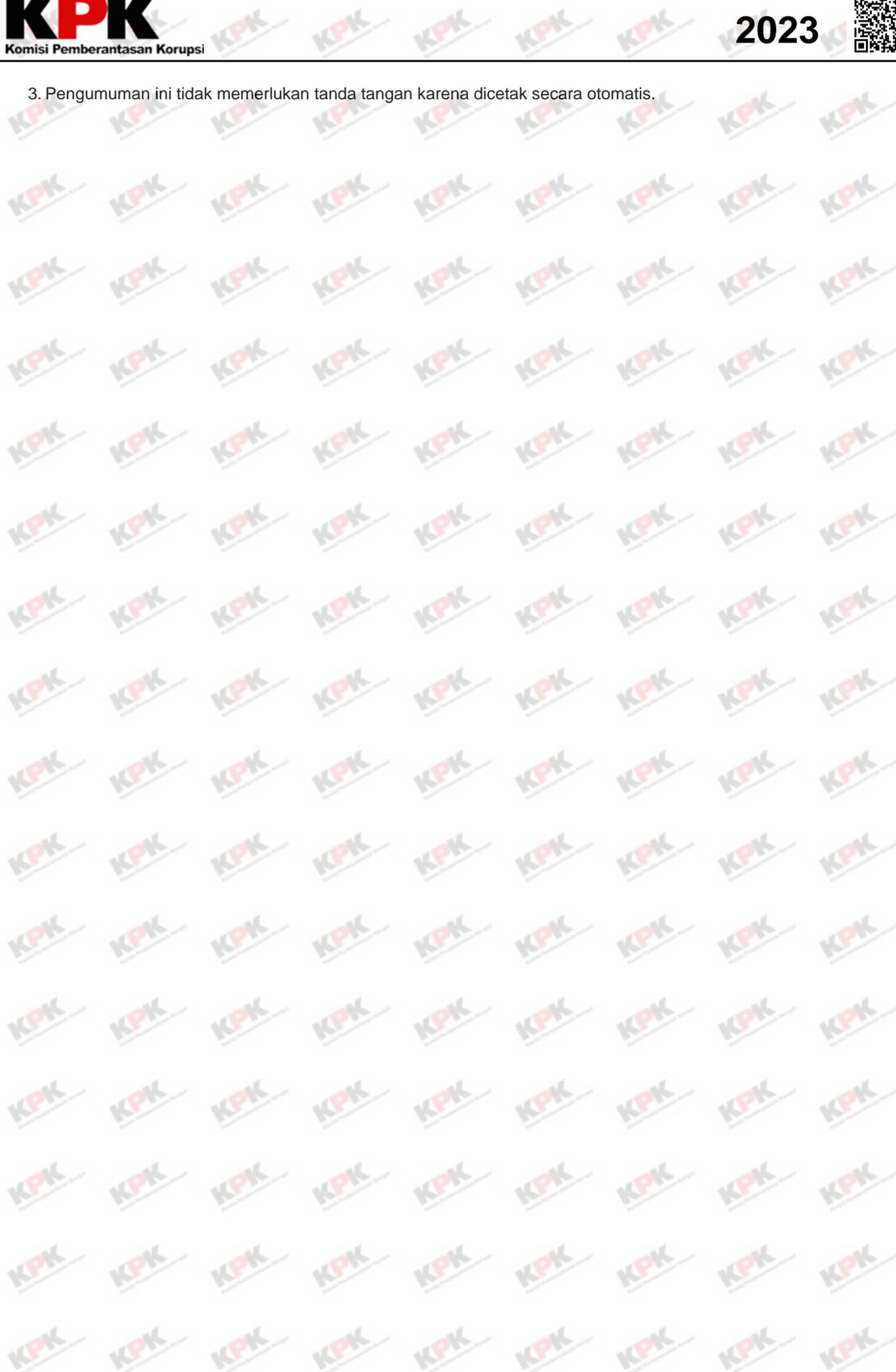
| | | |
|---|-----|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 950.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, LAINNYA Rp. 300.000.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 5.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 24.750.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 286.504.177 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 1.266.254.177 |
| III. HUTANG | Rp. | 45.400.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 1.220.854.177 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAN ANDRIANI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 147874

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 944.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m2/40 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 137.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 67.500.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, DATSUN GO PANCA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.332.510

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.027.382.510

III. HUTANG Rp. 310.441.253

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 716.941.257

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : YULIUS ARGO BAROTO
- Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
- NHK : 897374

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|--------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 320.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/36 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 43.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000 | | |
| 2. MOBIL, HYUNDAI GETZ Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 5.250.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 3.790.186 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 372.040.186 |

III. HUTANG Rp. **180.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **192.040.186**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

